

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara demokrasi diamanati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pada tahun 2020, Indonesia menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 224 kabupaten dan 37 kota. Dalam momentum tersebut, partisipasi perempuan dalam serangkaian kontestasi Pilkada serentak tahun 2020 mencatatkan peningkatan secara signifikan dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) melaporkan sebanyak 157 perempuan mencalonkan diri sebagai kontestan dari total 1486 calon kontestan yang berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun 2020.<sup>1</sup> Di Jawa Timur, pada gelaran Pilkada serentak tahun 2020 diikuti oleh 15 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sedikit mundur ke belakang, pada Pilkada tahun 2018, Jawa Timur diketahui meloloskan sebanyak 10 kepala daerah dan wakil kepala daerah, salah satunya adalah Khofifah Indar Parawansa, yang kini menjabat Gubernur Jawa Timur.

Potensi besar tingkat keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah di Jawa Timur salah satunya dipengaruhi oleh tingkat partisipasi politik perempuan. Buktinya di Pilkada Jawa Timur, partisipasi politik perempuan mencapai angka 4,45% atau tergolong ke dalam kategori partisipasi politik menengah. Hasil penelitian Astuti dkk menunjukkan, mayoritas responden perempuan di Jawa Timur mengaku setuju dengan kepemimpinan perempuan yakni sebesar 78 persen. Alasannya pun beragam, di

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5190123/partisipasi-calon-kepala-daerah-perempuan-di-pilkada-2020-naik-106> diakses 3 September 2022.

antaranya karena kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan (51,3 persen), berdasarkan kualitas pribadi (30,8 persen), perempuan lebih tegas dan tekun dari laki-laki (10,2 persen), yang tahu kepentingan perempuan adalah perempuan (5,1 persen) dan perubahan zaman (2,6 persen).<sup>2</sup> Dalam konteks Kabupaten Gresik, perempuan juga menjadi subjek yang sangat berpengaruh dan potensial dalam perhelatan Pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam rilis Daftar Pemilih Tetap (DPT) menunjukkan bahwa pemilih dari kalangan perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Dari total 918.192 DPT, sebanyak 456.202 adalah pemilih laki-laki dan 461.990 adalah pemilih perempuan.<sup>3</sup>

Dalam Pilkada serentak tahun 2020, Kabupaten Gresik adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati. Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020 diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Dua pasangan calon (paslon) tersebut adalah M. Qosim – Asluchul Alif sebagai paslon 1 yang diusung PKB, Gerindra, dan Berkarya dan paslon 2 Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah diusung Nasdem, Golkar, PDIP, Demokrat, PPP, dan PKS. Menariknya, dari kedua paslon tersebut terdapat sosok perempuan yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020 yakni Aminatun Habibah yang berposisi sebagai Calon Wakil Bupati.

Pencalonan Aminatun Habibah (Bu Min) sebagai Cawabup yang mendampingi Calon Bupati (Cabup) Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) merupakan keikutsertaan

---

<sup>2</sup> Pudji Astuti, dkk, Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur, *Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan*, Volume 13 Nomor 2 Desember 2019.

<sup>3</sup> <https://kab-gresik.kpu.go.id/arsip/18/ba-dan-rekapitulasi-dpt-pemilihan-serentak-2020> diakses 3 September 2022.

perempuan untuk pertama kalinya dalam kontestasi Pilkada sebagai Cawabup di Kabupaten Gresik. Apabila dirunut ke belakang, sejak Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2005 sampai tahun 2020 belum ada perempuan yang mencalonkan diri menjadi Cabup maupun Cawabup, terlebih sampai mampu keluar sebagai pemenang. Paslon Gus Yani dan Bu Min dinyatakan menjadi pemenang dengan perolehan 369.844 suara dan berhasil mengungguli lawannya yakni M. Qosim dan Asluchul Alif dengan perolehan 355.611 suara.<sup>4</sup> Karena itu, fenomena pencalonan dan terpilihnya Bu Min sebagai wakil bupati telah menorehkan sejarah tersendiri dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Gresik. Padahal sebelum Pilkada digelar, *Alvara Research Center* melaporkan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas paslon paslon 1 lebih tinggi dibandingkan paslon 2. Paslon Pak Qosim- Dokter Alif memperoleh elektabilitas sebesar 49,6 persen, sementara paslon Gus Yani-Bu Min hanya mendapat elektabilitas 39,8 persen.<sup>5</sup>

Menilik hasil survei dan keberadaan figur perempuan sebagai kontestan, kemenangan paslon Gus Yani-Bu Min tentu saja mengagetkan banyak pihak. Pasalnya, Pak Qosim sebagai Cabup dari paslon 1 merupakan petahana yang menjabat Wakil Bupati Gresik selama dua periode mendampingi Sambari Halim Radianto. Sementara Cawabupnya, Dokter Alif adalah seorang politisi yang menjabat posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Gresik. Di lain sisi, Gus Yani sebagai Cabup paslon 2, diketahui baru setahun menjabat Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Gus Yani menjabat Ketua DPRD Kabupaten Gresik menggantikan Plt. Ahmad

---

<sup>4</sup> [https://kab-gresik.kpu.go.id/dmdocument/1653375104SK-Penetapan%20Paslon-22%20Januari%202020\\_compressed.pdf](https://kab-gresik.kpu.go.id/dmdocument/1653375104SK-Penetapan%20Paslon-22%20Januari%202020_compressed.pdf) diakses 3 September 2022.

<sup>5</sup> <https://tirto.id/siapa-pemenang-pilkada-gresik-2020-qosim-alif-atau-yani-aminatun-f7Wg> diakses 3 September 2022.

Nurhamin dengan perolehan suara pada Pemilihan Legislatif sebanyak 18.023 melalui PKB di Daerah Pemilihan 2 (Cerme dan Duduksampean). Pada Pemilu tahun 2019, di Gresik, PKB meraup total suara calon legislatif dan partai politik sebanyak 186.385 suara sehingga memperoleh kursi mayoritas yakni 13 kursi dari total 50 kursi DPRD Kabupaten Gresik.<sup>6</sup> Sementara itu Cawabupnya, Bu Min merupakan seorang aktivis perempuan yang bergiat di bidang sosial dan pendidikan serta seorang nyai pesantren dari Pondok Pesantren Qomaruddin, Bungah, Kabupaten Gresik.

Berbanding terbalik dengan Pemilu tahun 2019, Gus Yani yang pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Gresik dari PKB, justru mencalonkan diri sebagai Cabup Gresik bukan dari PKB, melainkan dari koalisi Parpol Nasdem, Golkar, PDI-P dan PPP. Karena PKB pada waktu itu memberikan surat rekomendasi partai kepada Pak Qosim yang merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik periode 2016-2021. Jika dibandingkan, modal sosial dan politik antara kedua paslon sebagaimana diuraikan di atas, maka kemenangan pasangan Gus Yani-Bu Min menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Terutama, yang berkaitan dengan posisi Bu Min yang menyandang status nyai pesantren sebagai Cawabup dan pengaruh politiknya dalam mengantarkannya merengkuh jabatan Wabup perempuan pertama di dalam sejarah Kabupaten Gresik.

Secara genealogis, Bu Min merupakan keturunan pengasuh pondok pesantren. Bu Min adalah anak dari KH. Ahmad Muhammad Al-Hammad, pengasuh Pondok

---

<sup>6</sup> Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 828/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 <https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik/search-keputusan-kpuk> diakses pada 30 November 2022.

Pesantren (Ponpes) Qomaruddin, Sampurnan, Bungah, Kabupaten Gresik. Ponpes itu merupakan yang tertua di Kabupaten Gresik. Menurut catatan historis, Ponpes Qomaruddin berdiri sejak tahun 1775.<sup>7</sup> Karena itu, sebagai ponpes tua dan memiliki sejarah panjang di Kabupaten Gresik, Ponpes Qomarudin tercatat memiliki banyak alumni dan santri. Alumninya tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2007, Ponpes Qomaruddin memiliki sebanyak 5045 santri yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan mulai taman kanak-kanak sampai dengan universitas.<sup>8</sup> Dengan demikian, santri dan ribuan alumni yang pernah menimba ilmu di Ponpes Qomaruddin pada gilirannya menjadi basis suara bagi Bu Min yang berstatus sebagai nyai pesantren sekaligus posisinya sebagai cawabup untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020 bersama Gus Yani.

Dari sekian banyak penelitian yang mengkaji tentang Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020, mayoritas lebih menitikberatkan untuk meneliti tentang strategi kampanye politik kedua paslon dalam menggaet suara pemilih. Arista dan Maya menulis strategi kampanye kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik pada masa pandemi Covid-19. Kedua paslon disebutkan melakukan kampanye secara tatap muka terbatas dan secara virtual. Keduanya juga melibatkan kyai dalam proses kampanyenya.<sup>9</sup> Syamsiah memaparkan peranan relawan Laskar Sakera dalam melakukan mobilisasi politik untuk memperoleh dukungan yang solid demi

---

<sup>7</sup> <https://www.qomaruddin.com/sejarah>, diakses 20 April 2022.

<sup>8</sup> Abdul Rouf Djabir, *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Qomaruddin*, (Gresik: Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik, 2007), hlm. 60

<sup>9</sup> Arista Maya Dewanti dan Maya Mustika Kartika Sari, *Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Pada Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19, Moral dan Kewarganegaraan* Volume 1 Nomor 3 Tahun 2001.

memenangkan paslon Gus Yani-Bu Min.<sup>10</sup> Sedangkan, penelitian tentang peran dan pengaruh politik Bu Min dengan statusnya sebagai nyai pesantren masih belum ada yang meneliti secara ilmiah. Karena dalam arena politik praktis, mayoritas penelitian menempatkan peranan kyai sebagai figur berpengaruh di dalam kontestasi Pemilu. Beberapa penelitian tentang peran dan pengaruh nyai pesantren dalam kemenangan Pilkada pernah dilakukan dengan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian ini. Safitri dan Adnan meneliti pengaruh modal sosial yang melekat dalam diri Cawabup Umi Azizah dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2018. Modal sosial yang dimiliki terbukti berhasil dalam menopang konsolidasi dan merajut jejaring politik yang kuat sehingga mampu memenangkan Umi Azizah dalam Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018.<sup>11</sup> Maula menjelaskan modal kultural, simbolik, dan politik yang dimiliki Nyai Mundjidah Wahab memberikan pengaruh signifikan terhadap kemenangannya dalam Pilkada Jombang.<sup>12</sup>

Partisipasi, pencalonan, dan kemenangan nyai pesantren—calon perempuan—dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020 yakni Bu Min adalah fenomena yang dikaji dalam penelitian ini. Kendati latar belakang Bu Min bukanlah sosok yang aktif malang melintang di dunia politik praktis, namun fakta bahwa posisinya sebagai nyai pesantren yang tergolong sebagai *cultural broker* ditengarai mampu memberikan pengaruh besar terhadap kemenangan paslon Gus Yani-Bu Min. Apalagi, citra

---

<sup>10</sup> Ni'matus Syamsiah, *Peran Laskar Sakera Dalam Mendukung Gus Yani – Bu Min (Niat): Studi Mobilisasi Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020*, Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2020.

<sup>11</sup> Dita Amalia Safitri, *Modal Sosial Dan Keterpilihan Umi Azizah Pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018*, *Politics and Government Studies*, Volume 9 Nomor 2, 2020.

<sup>12</sup> Atiqotul Maula, *Perempuan dan Politik Dalam Kontestasi Pilkada Di Jombang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Kabupaten Gresik sebagai kota santri, tentu keputusan untuk mencalonkan seorang nyai pesantren dalam Pilkada untuk meraih kemenangan merupakan pilihan yang tepat dan strategis. Mengingat dalam pertarungan Pilkada Gresik tahun 2020, Gus Yani mempertaruhkan jabatan politiknya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gresik, sehingga dalam menentukan pilihan Cawabup yang dalam hal ini pilihannya dijatuhkan kepada Bu Min, dirinya harus melakukan perhitungan yang amat matang.

Maka dari itu, menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait bagaimana posisi, peran, dan pengaruh sosial politik nyai pesantren yakni Bu Min sebagai Cawabup berpengaruh dalam memenangi kontestasi Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020. Peneliti memiliki beberapa hipotesis terkait peran dan pengaruh nyai pesantren dalam meraih kemenangan pada Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020. Pertama, sebagai *local strongmen* yaitu nyai pesantren menjadi modal strategis untuk maju di dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Gresik dengan mengamankan basis pemilih dari kalangan alumni dan santri, khususnya jejaring Ponpes Qomaruddin. Kedua, partisipasi politik nyai pesantren sebagai Cawabup yang merepresentasikan perwakilan pemimpin perempuan adalah salah satu strategi untuk menggaet suara dari kalangan pemilih perempuan yang lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki, terlebih dalam paslon nomor 1 yang diisi oleh figur laki-laki. Besar kemungkinan celah tersebut menjadi titik eksplorasi pendulungan suara oleh paslon Gus Yani-Bu Min untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat dua pertanyaan rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengapa nyai pesantren dipilih menjadi Cawabup pada Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020?
2. Bagaimana peran dan pengaruh politik nyai pesantren berkontribusi memenangkan Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis alasan-alasan strategis pemilihan nyai pesantren yang merepresentasikan santri sekaligus kalangan perempuan. Dalam konteks ini adalah Bu Min sebagai Cawabup mendampingi Cabup Gus Yani dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan dan pengaruh politik nyai pesantren dan aktivis perempuan Bu Min sebagai Cawabup dalam menggaet suara potensial dari kalangan perempuan dan kalangan santri untuk memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara akademis dapat memberikan pengetahuan untuk memahami realitas bagaimana politik bekerja dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam spasial Kabupaten Gresik. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran praktik patronase yang sesungguhnya terjadi dalam arena politik praktis Kabupaten Gresik.

Sementara itu, secara praktis penelitian ini memberikan gambaran kepada masyarakat Gresik mengenai konstelasi yang pernah terjadi di daerahnya. Gambaran tersebut diharapkan dapat menjadi media pendidikan politik yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas Pilkada Gresik pada masa yang akan datang yang bermuara terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dimaksud disini adalah kajian-kajian yang pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya maupun yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dengan mengetahui posisi dan relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka bisa diketahui celah penelitian yang bisa dikerjakan sehingga memunculkan aspek kebaruan dari penelitian. Oleh karena itu, bawah ini diuraikan sejumlah kajian terdahulu bersama dengan keunikan, persamaan, dan perbedaannya yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Pertama, artikel Dewanti dan Sari yang berjudul *Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Pada Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19*.<sup>13</sup> Artikel tersebut mendeskripsikan beberapa strategi kampanye yang digunakan oleh kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang salah satunya adalah bersilaturahmi dan memohon do'a restu serta dukungan dari kalangan ulama pesantren. Kedua paslon mempunyai kesamaan pemahaman terkait pengaruh besar kalangan pesantren dalam mendulang suara sehingga dipandang perlu untuk *sowan*

---

<sup>13</sup> Arista Maya Dewanti & Maya Mustika Kartika Sari, Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Pada Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2021, hlm. 704-718.

kepada mereka. Namun terkait target sasaran kampanye ada perbedaan, paslon 1 cenderung menysasar *wong cilik* seperti petani, nelayan, anak yatim, janda, dan anak putus sekolah. Sedangkan paslon 2 lebih membidik pemilih perempuan, santri, dan pemilih pemula. Perbedaan sasaran kampanye ini tidak terlepas dari latar belakang kedua paslon yang secara komposisi gender ada perberbedaan. Dalam pengumpulan datanya, artikel ini melakukan wawancara dengan tim pemenangan kedua paslon. Dari artikel tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dan informan yang dipilih untuk pengumpulan data. Artikel Dewanti dan Sari fokus meneliti strategi kampanye kedua paslon serta sasaran kampanyenya sedangkan penelitian ini fokus pada rekrutmen politik pemelihan Aminatun sebagai Cawabup dan pengaruh serta perannya dalam mengamankan suara dari kalangan perempuan dan pesanten. Sementara terkait pemilihan informan, selain mewawancarai ketua tim pemenangan, penelitian ini dalam pengumpulan datanya juga mewawancarai Bupati dan Wakil Bupati Gresik, ring satu tim sukses dan relawan, dan masyarakat pemilih Gus Yani dan Bu Min sehingga akan diperoleh informasi yang berbeda dengan artikel tersebut.

Kedua, tulisan berjudul *Peran Politik Perempuan Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Gresik* karya Abdulla Hubet.<sup>14</sup> Tulisan tersebut menguraikan peran aktif perempuan di Ponpes Ihyaul Ulum dalam mendukung parpol maupun kandidat tertentu bahkan mendelegasikan salah satu pengurus pesantren menjadi kandidat untuk meraih suatu jabatan politik pemerintahan, khususnya di ranah legislatif. Dalam konteks tulisan tersebut, sosok perempuan yang aktif berpolitik praktis adalah Nyai Wafiroh Ma'sum.

---

<sup>14</sup> Abdulla Hubet, Peran Politik Perempuan Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Gresik, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3, Nomor 1, April 2013, hlm. 187-213

Sosoknya diketahui merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sukses menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Gresik sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2022—tutup usia. Melalui tulisan tersebut, maka bisa diketahui bahwa kiprah politisi perempuan yang berlatar belakang pesantren sebelumnya sudah pernah mewarnai arena politik praktis Gresik sejak lama. Berkat kapasitas dan modal sosial, kultural, dan politik yang dimiliki, politisi perempuan dari pesantren—nyai pesantren—terbukti sukses menduduki posisi strategis di pemerintahan. Tulisan tersebut selaras dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam melihat sepak terjang dan kontribusi politik Bu Min yang berasal dari Ponpes Qomaruddin ketika menjadi Cawabup representasi perempuan dan kalangan pesantren sehingga sukses mengantarkannya menjadi wakil bupati Gresik.

Ketiga, artikel karya Nurul Azizah yang berjudul *Perempuan Pemenang Pemilu pada Studi Perspektif Gender dan Meluruhnya Budaya Patriarki di Provinsi Jawa Timur*.<sup>15</sup> Artikel ini membahas enam perempuan—termasuk nyai pesantren—yang menjadi kandidat bahkan memenangi Pilkada di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang didukung oleh parpol. Sepak terjang keenamnya dilihat sebagai realitas semakin wajarnya perempuan—dan nyai pesantren—berkompetisi di arena politik praktis, khususnya dalam konteks Pilkada. Karena, partisipasi mereka dalam perhelatan Pilkada masih tergolong fenomena yang baru jika dibandingkan keikutsertaanya dalam pemilihan legislatif (Pileg). Adapun alasan parpol menjadikan sejumlah perempuan atau nyai pesantren sebagai kandidat bahkan mampu memenangi Pilkada kabupaten/kota

---

<sup>15</sup> Nurul Azizah, *Perempuan Pemenang Pemilu pada Studi Perspektif Gender dan Meluruhnya Budaya Patriarki di Provinsi Jawa Timur*, *Marwah*, Volume 12 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 153-164.

diantaranya karena memiliki modal ekonomi yang banyak, modal sosial yang kuat, dan modal politik yang besar. Posisi artikel tersebut yang berhasil menguak motif parpol maupun kandidat laki-laki memihak figur perempuan—nyai pesantren—tentu sangat penting kaitannya sebagai pijakan untuk mengeksplorasi motif Gus Yani maupun parpol koalisi pendukungnya memutuskan memihak Bu Min sebagai Cawabup pada Pilkada Gresik tahun 2020.

Keempat, tulisan berjudul *Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada Jombang* karya Atiqotul Maula.<sup>16</sup> Tulisan tersebut mengambil studi kasus Mundjidah Wahab—sekarang Bupati Jombang—sebagai Cawabup yang dalam pertarungannya di Pilkada tahun 2014 sukses meraih kemenangan. Kemunculan Mundjidah Wahab sebagai Cawabup yang kemudian berhasil menjadi wabup, diketahui berkaitan erat dengan kepemilikan modal politik, modal kultural, dan modal simbolik sebagai anak dari seorang kyai kharismatik dan pengasuh pondok pesantren Tambakberas Jombang. Secara spesifik, Mudjidah Wahab melakukan kerja-kerja politik seperti membuat jaringan aktivis perempuan khususnya dari kalangan Nadhlatul Ulama (NU) sebagai salah satu penopang kemenangannya. Kesuksesannya menduduki jabatan wabup dilihat sebagai dobrakan atas dominasi laki-laki dalam konteks di Pilkada Jombang. Tulisan tersebut tentu sangat relevan dengan penelitian ini yang membahas partisipasi Aminatun sebagai perempuan pertama yang menjadi Cawabup dan wabup di Gresik yang dalam proses pemenangannya juga memaksimalkan peranan dan kontribusi jejaring aktivis perempuan; nyai pesantren. Selain kesamaan posisi Mundjidah Wahab dan Bu Min

---

<sup>16</sup> Atiqotul Maula, *Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada Jombang*, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 6, Nomor 1, November 2016, hlm. 241-272.

sebagai anak kyai pesantren besar di daerah masing-masing tentu akan memudahkan proses deskripsi dan analisis dalam penelitian ini.

Kelima, artikel karya Mohamad Irfan Nuryadin yang berjudul *Perilaku Memilih Perempuan dalam Kemenangan Kandidat Perempuan Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015*.<sup>17</sup> Tulisan tersebut menguraikan hasil analisis data kuantitatifnya bahwa perilaku pemilih berbasis gender memiliki pengaruh besar bagi kemenangan kandidat perempuan. Hal ini tidak terlepas dari data yang menyebutkan bahwa pemilih dan partisipasi politik perempuan dalam Pilkada Klaten lebih tinggi dibandingkan pemilih dan partisipasi politik laki-laki. Selain itu, faktor mesin politik dalam melakukan kerja-kerja politik seperti kampanye program kerja unggulan turut memainkan peranan krusial dalam proses pemenangan kandidat perempuan. Temuan dari tulisan tersebut memiliki relevansi bagi penelitian ini dalam konteks jumlah pemilih dan partisipasi politik perempuan yang lebih tinggi dibandingkan pemilih dan partisipasi politik laki-laki di Gresik sehingga mampu mengantarkan Aminatun menjadi wakil bupati Gresik. Perilaku memilih perempuan yang memberikan dukungan bagi kandidat perempuan tidak terlepas dari keinginan agar memiliki perwakilan perempuan sehingga diharapkan memperoleh perhatian dan kepentingannya diakomodir di dalam kebijakan. Hal ini bisa dilihat dari giat kampanye jaringan aktivis perempuan—nyai pesantren—dalam menggalang dukungan dari ceruk suara perempuan dan pesantren supaya mendukung paslon Gus Yani-Bu Min.

---

<sup>17</sup> Mohamad Irfan Nuryadin, *Perilaku Memilih Perempuan dalam Kemenangan Kandidat Perempuan Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015*, [https://repository.unair.ac.id/70489/3/JURNAL\\_Fis.P.10%2018%20Nur%20p.pdf](https://repository.unair.ac.id/70489/3/JURNAL_Fis.P.10%2018%20Nur%20p.pdf) diakses 6 Desember 2022.

Keenam, tulisan berjudul *Elite Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur* karya Abdul Chalik.<sup>18</sup> Tulisan ini menjelaskan keterlibatan elit lokal berbasis pesantren yang sangat dominan dalam memenangkan sejumlah pemimpin daerah pada Pilkada tahun 2015 di Jawa Timur. Hal itu tidak terlepas dari kuatnya kultur pesantren dan masyarakat santri di Jawa Timur sehingga ketika elit lokal—kyai, nyai, gus, ning—mendukung salah satu paslon dalam Pilkada pasti mayoritas masyarakat akan mengikuti pilihan atau instruksi dari elit lokal tersebut. Dari sejumlah paslon yang didukung oleh elit lokal berbasis pesantren, terdapat dua kandidat perempuan/nyai pesantren yang sukses meraih kemenangan dalam Pilkada serentak tahun 2015 yakni Nyai Eva memenangi Pilkada Sumenep dan Nyai Kartika Hidayati menang di Lamongan. Berdasarkan tulisan tersebut, maka dapat dipahami bahwa elit lokal berbasis pesantren memegang peranan penting dalam proses pemenangan kandidat pemimpin daerah pada gelaran Pilkada di lingkup Jawa Timur. Oleh karena itu, Gresik yang notabene juga kuat kultur pesantren dan masyarakat santrinya, oleh para kandidat pemimpin daerah setempat dipandang penting untuk merangkul tokoh pesantren dalam proses pemenangannya. Dengan demikian, keputusan Gus Yani dan parpol pendukungan memilih Bu Min yang berasal dari Ponpes Qomaruddin bisa jadi karena alasan realitas sosial politik tersebut. Maka tulisan tersebut sangat relevan dijadikan rujukan peneliti dalam proses menggali informasi dan data mengenai alasan keputusan memilih Bu Min yang merepresentasikan perempuan dan

---

<sup>18</sup> Abdul Chalik, *Elite Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur*, *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Volume 23, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 363-381.

(nyai) pesantren dan peranan elit lokal berbasis pesantren di Gresik dalam memenangkan paslon Gus Yani-Bu Min.

## **1.6 Kerangka Konsep**

### **1.6.1 *Local Election***

Menurut Marschall, studi mengenai *local election* atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih belum banyak dilakukan jika dibandingkan dengan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih kepala negara atau pemerintahan serta anggota legislatif.<sup>19</sup> Argumentasi tersebut berpijak pada realitas politik praktis dalam konteks Amerika Serikat yang kurang memperhatikan fenomena *local election* dan kepemimpinan daerah, padahal di Amerika Serikat terdapat sekitar 89.476 pemerintah daerah dan kota pada tahun 2007. Sementara itu, apabila dirunut lebih jauh, fenomena penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal atau daerah sesungguhnya sudah didorong oleh banyak pemerintah pusat diberbagai negara, misalnya di Pakistan pada tahun 1977-1988, Cina pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, Arab Saudi pada tahun 2005, Vietnam pada tahun 1998, Yaman pada tahun 2001, dan di Indonesia pada tahun 1968-1998 ketika dipimpin oleh Suharto. Tujuan dari penyelenggaraan *local election* adalah untuk memilih pemimpin daerah sekaligus guna mempermudah mengontrol masyarakat di daerah.<sup>20</sup>

Menurut Lay, dalam konteks Indonesia, pelaksanaan Pilkada merupakan proses pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) yang berlangsung di dalam negara dan

---

<sup>19</sup> Melissa Marschall dkk. *The Study of Local Elections. Symposium: Political Science and Politic*, 2011, hlm. 97.

<sup>20</sup> Monica Martinez-Bravo dkk. *The Rise and Fall of Local Elections in China: Theory and Empirical Evidence on The Autocrats Trade-Off*. Cambridge University: National Bureau of Economic Research, 2017, hlm. 1.

masyarakat. Dalam konteks negara berfungsi untuk tiga hal yakni pertama, pelembagaan mekanisme, menciptakan kepercayaan aktor politik di daerah<sup>21</sup>; kedua, penguatan kapasitas administratif-teknokratik pemerintah daerah untuk mengiringi pelembagaan yang sudah diciptakan; ketiga, Pilkada langsung telah memaksa terjadinya pelunakan watak koersi negara di tingkat lokal ke arah watak lebih lunak. Sedangkan dalam konteks masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan peningkatan partisipasi masyarakat ke dalam ranah dan aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilkada menjadi titik tolak bagi penguatan peran masyarakat, yang berlangsung secara terus menerus atau dalam pemerintahan terpilih lima tahun berikutnya yang pada gilirannya dapat mengubah wajah politik di tingkat lokal.<sup>22</sup> Hal tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang desentralisasi sekaligus mengusung agenda demokratisasi di tingkat daerah sehingga masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih secara langsung pemimpin daerahnya.<sup>23</sup>

Selain itu, Menurut Marijan, dalam kontestasi politik *local election* atau Pilkada, kandidat politik harus memiliki setidaknya tiga modal yakni modal ekonomi, modal politik, dan modal sosial. Kepemilikan tiga modal tersebut diketahui dapat memberikan dampak positif bagi seorang kandidat pemimpin daerah supaya dapat dipilih atau memperoleh dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar modal yang

---

<sup>21</sup> Cornelis Lay. Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 11 No. 1, 2007 hlm. 71 dalam Archon Fung dan Aerik Olin Wright. *Deepening Democracy; Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. London: Verso, 2003).

<sup>22</sup> Cornelis Lay, *Ibid*, hlm 71-72.

<sup>23</sup> Dede Mariana dan luthfi Hamzah Husin. Democracy, Local Election, and Political Dynasty in Indonesian Politics. *Jurnal Wacana Politik* Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 89.

dimiliki oleh seorang calon kandidat pemimpin daerah maka semakin besar pula peluang keterpilihannya.<sup>24</sup>

Batasan dalam konteks penelitian ini adalah Pilkada Gresik tahun 2020 yang melibatkan dua kandidat paslon bupati dan wakil bupati yakni Pak Qosim-Dokter Alif dan Gus Yani-Bu Min. Pilkada Gresik tahun 2020 yang dimaksud meliputi seluruh tahapan sejak pendaftaran paslon ke KPU Kabupaten Gresik sampai dengan penetapan paslon terpilih Pilkada Gresik tahun 2020. Tak terkecuali dinamika politik yang timbul disepanjang tahapan Pilkada Gresik tahun 2020.

### **1.6.2 *Contentious Politics***

Realitas konstelasi politik ketika memasuki momentum Pilkada diketahui selalu berlangsung secara dinamis. Hal itu dikarenakan terjadi proses perebutan ruang dan berbagai yang tak jarang menimbulkan gesekan politik demi memenangkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Proses perebutan tersebut dilakukan dengan mengerahkan segenap kekuatan dan modal baik itu sosial, finansial, kultural, dan politik. Kepiawaian mengelola dan mendistribusikan segenap modal yang dimiliki untuk mempengaruhi masyarakat akan mengantarkan seseorang atau kelompok meraih kemenangan politik.

Ilustrasi kondisi di atas relevan dengan konsepsi Tilly mengenai politik perseteruan (*contentious politics*). Menurut Tilly, politik perseteruan adalah penggunaan cara-cara yang mengganggu aktivitas normal masyarakat dalam rangka menunjukkan

---

<sup>24</sup> Ratna Solihah dkk. Jeje-Adang's Capital Relations in Local Election of Pangandaran Regency. *Mimbar* Vol. 34 No. 2, 2018, hlm. 379.

sikap dan pilihan politik atau ingin mengubah suatu kebijakan yang tidak disepakati.<sup>25</sup> Tarrow menjelaskan lebih detail bahwa politik perseteruan biasa terjadi ketika orang biasa bersama dengan orang berpengaruh di tengah masyarakat membangun kekuatan untuk mengkonfrontasi golongan yang memegang otoritas maupun kelompok lawan.<sup>26</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa momentum Pilkada dapat memantik kemunculan gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk meraih dukungan politik dari berbagai pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat baik secara sosial, ekonomi, kultural, dan politik. Gerakan-gerakan sosial yang timbul pun sering kali diketahui saling berseberangan satu sama lain karena adanya perbedaan dukungan politik. Hal tersebut biasanya terlihat ketika masa kampanye dan sesaat menjelang hari pemungutan suara Pilkada.

Batasan perseteruan politik yang menjadi fokus penelitian ini adalah dinamika perebutan dukungan politik dalam irisan yang sama—santri dan perempuan—antar paslon bersama tim sukses pada Pilkada Gresik tahun 2020. Hal itu dilakukan tidak lain bertujuan untuk memenangkan kontestasi Pilkada Gresik tahun 2020. Menariknya, kedua pasangan calon memaksimalkan jejaring dan pengaruh kyai-nyai pesantren dalam proses pemenangan Pilkada. Kesamaan tersebutlah yang dalam realitas di lapangan menimbulkan perseteruan politik untuk memperebutkan dukungan dari kalangan santri

---

<sup>25</sup> Charles Tilly, *Contentious Performances*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 5, dalam Nuri Soeseno, *Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama*, *Jurnal Politik*, Volume 1 Issue 1 Artikel 1, 2022, hlm. 12.

<sup>26</sup> Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics*. 2<sup>nd</sup> (ed), (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) hlm. 2 dalam Nuri Soeseno, *Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama*, *Jurnal Politik*, Volume 1 Issue 1 Artikel 1, 2022, hlm. 13.

dan perempuan diantara kedua paslon Cabup-Cawabup Gresik. Perebutan dukungan dari kalangan santri dan perempuan tersebut dapat dimaknai sebagai praktik perseteruan politik.

## **1.7 Kerangka Teori**

### **1.7.1 Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik merupakan tahapan yang menjadi kunci dari keberhasilan suatu sistem politik. Karena dalam tahap ini terjadi proses penentuan sekelompok orang atau personal yang akan menggerakkan sistem politik melalui istitusi-institusi formal yang ada. Rekrutmen politik meliputi pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan dalam sistem politik pada umumnya dan khususnya dalam pemerintahan.<sup>27</sup> Dalam konteks rekrutmen politik di skala kedaerahan, proses penentuan kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan tahapan yang sangat krusial terhadap keberlangsungan jalannya sistem politik daerah, khususnya bagi politisi perempuan.<sup>28</sup> Karena di Indonesia, mayoritas kandidat pasangan calon kepala daerah yang masuk ke dalam gelanggang pemilihan umum melalui kendaraan partai politik maupun koalisi antar partai politik adalah laki-laki, alih-alih mengusung calon kepala daerah perempuan. Sangat jarang pula ditemukan sosok perempuan yang mencalonkan diri secara independen karena sulitnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan penyelenggara Pemilu apabila tanpa memperoleh surat rekomendasi dari partai politik. Terlebih, secara umum dalam proses

---

<sup>27</sup> Dwi Karunia Rizki, Pola Rekrutmen Partai Nasional Demokrat Pada Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2017, hlm. 68-69.

<sup>28</sup> Nagda Hinojosa, *Selecting Women: Political Representation and Candidate Selection in Latin America*, 2012 dalam modal strategi dan jaringan hlm. 3

penentuan kandidat calon kepala daerah, mekanismenya berlangsung secara elitis, sentralistik, dan tertutup (tidak transparan).<sup>29</sup>

Menurut Norris proses rekrutmen politik dibagi ke dalam tiga tahapan yakni sertifikasi, nominasi, dan pemilihan.<sup>30</sup> Tahapan tersebut biasanya diterapkan oleh partai politik dalam menjalankan mekanisme partai untuk menentukan calon kandidat yang akan bertarung dalam perebutan kursi legislatif maupun eksekutif. Pertama, tahap sertifikasi, disajikan tentang syarat-syarat pencalonan yang harus dipenuhi dengan merujuk pada produk hukum Pemilu, aturan-aturan partai politik, dan norma-norma sosial. Kedua, tahap nominasi, memunculkan nama-nama bakal calon yang akan diproses dan dinilai oleh panitia seleksi untuk dicalonkan dalam Pemilu. Tahapan ini bisa berlangsung secara terbuka maupun tertutup. Ketiga, tahap pemilihan, merupakan tahap terakhir bagi kandidat berkontestasi dalam Pemilu untuk merebut kursi baik legislatif maupun eksekutif serta jabatan publik lainnya.<sup>31</sup>

Dalam tiga tahapan proses rekrutmen politik tersebut, tahapan nominasi dinilai paling krusial dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Karena, ketika telah ditentukan sejumlah bakal calon kandidat yang telah memenuhi syarat administratif dan akan diputuskan menjadi calon kandidat, di dalamnya terjadi proses politik yang sangat dinamis yang melibatkan beberapa aktor dan kekuatan politik. Dinamika yang terjadi pada tahap nominasi itulah sering kali menarik perhatian untuk diteliti. Sebab, banyak

---

<sup>29</sup> Kurniawati Hastuti Dewi, dkk, Modal, Strategi, dan Jaringan Perempuan Politisi, *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 3

<sup>30</sup> Pippa Norris, *Political Recruitment: Gender, Race, and Class in the British Parliament*, Cambridge University Press, 1995, hlm. 2

<sup>31</sup> Pippa Norris dalam Richar S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, (New York, Sage Publications, 2006) hlm. 95.

faktor yang mempengaruhi proses penentuan hasil akhir nama kandidat yang diusung, baik dari internal maupun eksternal partai politik, termasuk faktor personal bakal calon kandidat yang meliputi latar belakang pendidikan, integritas, dan citra diri secara spesifik yang menarik perhatian para pemilih juga berpengaruh.

### **1.7.2 Patronase**

Dalam mengkaji suatu fenomena politik, tidak cukup hanya memahami institusi formal pemerintahan semata, karena lebih dari pada itu, realitas politik praktis juga menyangkut ihwal pertarungan antar partai politik satu dengan partai politik yang lain, gerakan politik akar rumput, dan pertarungan adu kekuatan politik oleh elit politik, elit ekonomi, dan elit agama. Aspinall dan Benschot menyebutkan bahwa aktor politik yang tengah berkontestasi sesungguhnya hanya ingin mengambil keuntungan materialistik dari sistem politik yang ada. Oleh karena itu, praktik politik yang dilakukan selalu atas dasar kepentingan pragmatis. Karena itu, seluruh penyaluran sejumlah bantuan, uang tunai, dan lain sebagainya tidak lain diberikan dalam rangka untuk memperoleh dukungan politik. Aspinall dan Benschot mengatakan bahwa wujud patronase mengacu pada barang-barang dan bantuan yang disediakan oleh para politisi baik dalam rupa kebijakan maupun sejumlah proyek sebagai imbalan atas dukungan politik yang diberikan pada saat pemilihan umum.<sup>32</sup>

Senada dengan itu, Widoyoko menyebutkan bahwa dalam skema patron-klien, aktor politik mempunyai otoritas untuk mengalokasikan dan mendistribusikan beragam wujud sumberdaya kepada para pemilih dan pengusaha melalui hubungan personal dan

---

<sup>32</sup> Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019), hlm. 4.

subjektif, bukan lewat aturan yang objektif, adil, dan terbuka, serta sebagai imbalannya, pemilih dan pengusaha memberikan dukungan politik dan sokongan finansial kepada aktor politik.<sup>33</sup> Realitas politik di Indonesia dewasa ini menunjukkan secara gamblang bahwasannya demokratisasi kerap kali diwarnai dengan praktik patronase dan klientilisme di dalamnya. Buktinya, di dalam jalanya roda institusi resmi pemerintahan dewasa ini masih berada di bawah bayang-bayang institusi informal yang turut menikmati keuntungan material ataupun bantuan nonmaterial dari kemenangan politisi yang memberikan proyek baik berskala kecil maupun besar.

Praktik tersebut masih terus berlangsung karena berkaitan dengan kebutuhan sumberdaya yang begitu besar, baik sumberdaya sosial politik maupun sumberdaya material para politisi selama proses pencalonan. Menilik selama proses negosiasi dengan partai politik, partai pengusung selalu memberikan target harga (mahar politik) yang besar kepada para kandidat politik dengan imbalan pemberian dukungan secara penuh dan menguntungkan bagi pasangan calon. Selain itu, kebutuhan untuk suplai dana bagi organisasi sayap, relawan, simpatisan, dan tim sukses pasangan calon ketika melakukan kampanye yang juga menghabiskan sumberdaya material sangat besar untuk menggerakkan mesin politiknya.

Praktik patronase ini secara umum terinstitusionalisasi. Seperti halnya suatu kelompok atau komunitas memberikan dukungan kepada salah satu calon tertentu. Dalam memahami fenomena relasi patron-klien, Aspinall menggunakan salah satu pendekatan, yaitu pendekatan kulturalis, di mana relasi ini terjadi karena adanya norma

---

<sup>33</sup> Johaness Danang Widoyoko, Politik, Patronase, dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet, *Integritas*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 4.

kultural dan moralitas yang membaluti sehingga seseorang dapat terjatuh dalam relasi yang tidak seimbang ini. Lebih lanjut, menurut Aspinall, praktik relasi patron-klien semacam ini dikaitkan dengan kekuatan moral yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat dan harapan untuk diberikan timbal balik. Dengan demikian, banyak ditemukan masyarakat yang memiliki konsep tersendiri mengenai kehormatan dan memiliki perasaan yang kuat mengenai pemenuhan kewajiban antar personal.<sup>34</sup> Masyarakat yang memiliki karakter kulturalis seperti itu mempunyai pandangan bahwa suara mereka memiliki nilai yang tidak lebih tinggi dari pada sumberdaya yang akan diberikan oleh pasangan calon. Maka dari itu, bagi Aspinall praktik patronase pada dasarnya merupakan kegiatan yang menjurus pada pertukaran manfaat atau materi yang didistribusikan melalui kegiatan klientelisme. Dalam pandangan Hutchcroft, klientelisme adalah relasi kekuasaan personal dengan status sosial yang lebih tinggi (patron) dengan mereka yang memiliki status sosial yang lebih rendah (klien) dalam suatu ikatan timbal balik yang saling menguntungkan.<sup>35</sup>

Sementara itu, Tomsa dalam suatu artikelnya mendefinisikan patronase sebagai relasi dua arah tatkala seseorang yang memiliki status ekonomi lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan seluruh sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang mempunyai status ekonomi lebih rendah (*klien*)

---

<sup>34</sup> Lamchard dan Roninger, *Political Clientelism, Democracy, and Market Economy*, 1980, hlm. 68 dalam Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019).

<sup>35</sup> Paul Hutchcroft, *Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism in Japan, Thailand, and the Philippines*, (Baltimore: Jhon Hopkin University Press, 2014) dalam Johannes Danang Widoyoko, *Politik, Patronase, dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet*, Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 4.

agar memberikan dukungan kepada patron.<sup>36</sup> Menurut Ahimsa, pola relasi patron-klien setidaknya dipengaruhi oleh tiga kondisi: pertama, adanya perbedaan yang mencolok dalam aspek kekayaan, status, dan kekuasaan; kedua, tidak adanya pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang berkaitan dengan status sosial maupun ekonomi; ketiga, ikatan kekeluargaan dinilai tidak lagi bisa menjadi jaminan untuk memperoleh perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan.<sup>37</sup> Dengan demikian, aktor patronase dipahami sebagai individu yang mempunyai kekuasaan, status, pengaruh, dan wewenang di tengah masyarakat.

Patronase bekerja untuk menyalurkan sumberdaya secara individual kepada pemilih, tim sukses, relawan, dalam rangka untuk memperoleh dukungan politik. Contoh dari praktik patronase misalnya pemberian keuntungan material yang didistribusikan oleh politisi, keuntungan material itu biasanya ditujukan untuk individu yakni berupa amplop uang tunai, kerudung, sarung, kaos, kalender, dan lain sebagainya. Selain itu, penyaluran sumberdaya juga ditujukan kepada kelompok misalnya berupa pendirian/renovasi fasilitas olahraga dan fasilitas rumah ibadah keagamaan di suatu desa/kampung. Di samping itu, realitas patronase juga terjadi dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) atau politik uang (*money politic*). Scott mengkategorikan lima model hubungan patronase: pertama, patronase politik dengan dominasi patron; kedua,

---

<sup>36</sup> Dirk Tomsa, Party System Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension, *Journal of East Asian Studies* 14 No.2, hlm. 249-278, dalam Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional, *Patronase, Klientisme, dan Politik Identitas Dalam Perhelatan Demokrasi Akar Rumput: Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Multi-etnis di Sulawesi dan NTB*, (Jakarta: PUSLITPEN LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 24.

<sup>37</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, *Patron & Klien di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007) hlm. 4.

patronase berbasis klien potensial; ketiga, keseimbangan antara patron dengan klien; keempat, kesinambungan; dan kelima, homogenitas.<sup>38</sup>

Bourdieu dalam sebuah artikelnya yang berjudul “*The Forms of Capital*” mendefinisikan modal sosial sebagai semua sumberdaya aktual dan potensial yang bersumber berkat kepemilikan jejaring relasi kelembagaan yang konstan berdasarkan sikap saling mengakui dan mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, besar kecilnya modal sosial yang dimiliki seseorang dari suatu komunitas tergantung dari kualitas dan kuantitas relasi yang bisa dibangun serta seberapa besar jumlah modal sosial, kultural, dan ekonomi yang dimiliki oleh orang-orang di dalam relasi tersebut.<sup>39</sup> Sementara itu Listiani dkk mengungkapkan bahwa dalam modal sosial Bourdieu, hubungan-hubungan dan jejaring hubungan-hubungan merupakan sumberdaya yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mereproduksi dan menentukan kedudukan sosial seseorang di dalam suatu kelompok.<sup>40</sup>

Berpijak pada uraian tersebut, dalam konteks penelitian ini, contohnya adalah sosok nyai pesantren. Nyai pesantren mempunyai status dan kedudukan sosial yang tinggi baik di dalam ponpes maupun di tengah masyarakat karena memiliki relasi yang kuat dengan pengasuh—mayoritas kyai—dan berbagai pesantren lainnya. Selain itu, nyai pesantren juga mempunyai relasi yang baik dengan pejabat politik pemerintahan dan para santri serta wali santri. Relasi dan jaringan relasi yang dimiliki tersebut pada

---

<sup>38</sup> James Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in South East Asia*, *The American Political Science Review*, Vol. 66 No. 1, hlm 91-113.

<sup>39</sup> Pierre Bourdieu, ‘The Forms of Capital’, dalam J Richardson (ed). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press, 1986, hlm. 249 dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2003, hlm. 3.

<sup>40</sup> Wanda Listiani dkk, Struktur Modal Pierre Bourdieu Pada Perilaku Kreatif Grafis Fashion Bandung, *ATRAT: Jurnal Seni Rupa*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2013, hlm. 79.

gilirannya bersamaan dengan kapasitas yang melekat pada dirinya telah menempatkan nyai pesantren sebagai elit dalam perspektif sosiologis. Jaringan yang sedemikian luas dengan berbagai pihak serta kapasitas yang memumpuni, merupakan modal sosial nyai pesantren yang mendorongnya mampu memainkan sejumlah peranan penting bagi publik sehingga disegani oleh publik—santri dan masyarakat.

Seorang nyai biasanya tidak sekedar menjadi pemimpin spiritual keagamaan dalam lingkup ponpes, melainkan juga sebagai pengasuh yang memimpin roda organisasi untuk mengembangkan ponpes secara keseluruhan. Nyai sebagai istri kyai biasanya yang memainkan peranan memimpin ponpes sepeninggal suami (kyai).<sup>41</sup> Selain itu, sosok yang sangat dekat dengan kyai juga biasa disebut nyai. Karena itu dalam konteks ini, posisi Aminatun Habibah sebagai anak KH. Ahmad Muhammad Al-Hammad pengasuh Ponpes Qomaruddin Gresik, termasuk ke dalam kategori sebagai nyai ponpes.

Menurut Marhumah, nyai memiliki tiga peranan utama yakni sebagai seorang guru, teladan, dan sumber nasihat bagi para santri di ponpes.<sup>42</sup> Dalam memerankan dirinya sebagai guru, nyai mendidik dan memberikan pemahaman kepada para santri terkait ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan umum sebagai bekal para santri untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nyai adalah pancaran teladan bagi para santri mulai dari kesopanan dan keluhuran perkataan dan perbuatan. Karena itu, sebagai seorang teladan, nyai memikul beban untuk mencetak karakter luhur santri diantaranya sederhana, bermoral, ahli agama dan

---

<sup>41</sup> Eka Srimulyani, *Women From Traditional Islamic Education Institutions In Indonesia Negotiating Public Spaces*, (Amsterdam: Universitas Amsterdam Press, 2012) hlm. 213.

<sup>42</sup> Erma Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2010) hlm. 7.

humanis. Nyai sebagai sumber nasihat santri merepresentasikan hubungan yang sangat dekat seperti ibu dan anak. Maka dari itu, nyai harus menjalin keakraban dengan santri sebagai bentuk kepedulian terhadap kebaikan santri. Keakraban tersebut bisa dibangun dengan sikap kasih sayang dan sabar terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan santri.<sup>43</sup>

Habibullah menyebut nyai memiliki peran publik khususnya dalam sektor pendidikan masyarakat. Nyai merupakan pendukung pengembangan dan kemajuan sebuah ponpes agar dapat menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, nyai juga melakukan proses penyadaran kolektif terkait pentingnya pendidikan bagi kehidupan bermasyarakat. Karena peranannya yang begitu luas, nyai dipandang sebagai figur yang memiliki kemandirian luar biasa.<sup>44</sup>

Modal serta kedudukan sosial yang tinggi di lingkungan pesantren dan masyarakat serta mempunyai relasi patronase dengan para santri berkat statusnya juga sebagai anak kyai, maka tidak heran bahwa nyai pesantren memiliki pengaruh yang kuat baik di lingkup ponpes maupun masyarakat. Secara politik, partisipasi nyai pesantren baik sebagai kandidat kepala daerah—pemimpin—maupun sebagai *cultural broker*, sesungguhnya merupakan fenomena yang semakin lumrah sejak dekade 1990-an.<sup>45</sup>

### **1.7.1 Gender dalam Politik**

Menurut Fakih, masyarakat kurang memahami perbedaan antara gender dengan seks. Seks atau jenis kelamin adalah identitas yang membedakan manusia berdasarkan

---

<sup>43</sup> *ibid*, Erma Marhumah, hlm. 85.

<sup>44</sup> Habibullah, Peran Nyai Dalam Pengembangan Pondok Pesantren, *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.3 No.1 tahun 2019, hlm. 114.

<sup>45</sup> Ibi Syatibi, Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren, *Al-Ahwal*, Vol 2 No. 1, 2009, hlm. 30.

sifat-sifat biologis yang melekat pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan berdasarkan konstruksi sosial dan kultural dari masyarakat.<sup>46</sup> Selaras dengan pandangan Fakih, Mosse menyebut gender sebagai seperangkat perilaku khusus yang meliputi penampilan, sikap, kepribadian, pekerjaan baik di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan lain-lain.<sup>47</sup>

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller. Secara etimologis, diksi gender berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *gender* yang mengandung makna jenis kelamin. Sementara itu, terminologi gender dipahami sebagai suatu konsep kultural yang berusaha membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, istilah gender umumnya merujuk kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari proses sosial-budaya yang sangat panjang.<sup>48</sup> Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan gender kemudian berdampak terhadap timbulnya ketidakadilan gender di tengah kehidupan keseharian masyarakat, tak terkecuali dalam arena politik praktis.

Di Indonesia, upaya mewujudkan kesetaraan gender di dalam arena politik praktis dilakukan dengan memberikan hak-hak politik bagi perempuan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan harus dipenuhi sebanyak 30% baik dalam struktur kepengurusan partai politik di seluruh tingkatan

---

<sup>46</sup> Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm. 8.

<sup>47</sup> Julia Cleves Mosse. *Gender dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 3.

<sup>48</sup> Azyumardi Azra. *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*. (Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 315.

maupun dalam komposisi pencalonan anggota legislatif di semua level.<sup>49</sup> Keberadaan kebijakan *affirmative action* tersebut pada perkembangannya tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pelengkap dalam struktur kepengurusan partai politik maupun sekedar menjadikan wakil perempuan di parlemen sebagai penggenap semata. Karena kedudukan politik perempuan sudah berada pada posisi strategis untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan aspirasi politik perempuan demi menciptakan kesetaraan dan keadilan gender baik di lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara.<sup>50</sup>

Menurut Frazer, riset politik telah lama cenderung menjadi kajian terhadap laki-laki atau bersifat maskulin. Padahal, Rosseau dan Hegel merumuskan teori gender untuk membedakan antara wilayah publik yang politis dan wilayah domestik yang privat. Dalam konteks ini, tugas utama feminisme politik adalah menguak teori gender secara eksplisit maupun implisit dari teori politik yang telah mapan. Selain itu, gerakan feminisme politik juga berupaya untuk membongkar relasi politik, lembaga-lembaga politik, dan berbagai aturan politik dengan menggunakan perspektif gender. Secara praktis, gerakan feminisme politik setidaknya melakukan empat hal: Pertama, menggiatkan kampanye secara terorganisir untuk mendesak tindakan legislatif seperti pembuatan produk perundang-undangan untuk menjamin hak suara perempuan, jaminan hak memilih dan dipilih bagi perempuan, serta menjadi kesetaraan ihwal kesempatan kerja bagi perempuan; Kedua, melakukan aksi kampanye terorganisir yang bersifat nonlegislatif seperti menuntut adanya keterwakilan perempuan di parlemen dan

---

<sup>49</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

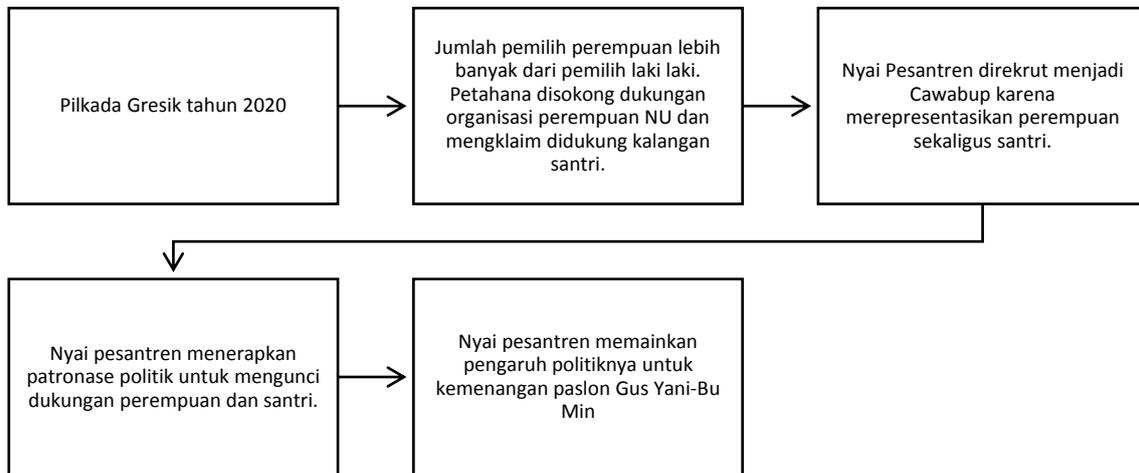
<sup>50</sup> T. O. Ihromi. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 120.

berbagai jabatan publik lainnya, menuntut supaya perempuan menduduki posisi sosial yang strategis seperti di sektor pendidikan dan keprofesian, serta menuntut kesempatan yang setara di dalam tubuh organisasi seperti klub olahraga, perusahaan, dan partai politik; Ketiga, melakukan aksi transformasi sosial secara informal seperti berbagai organisasi swadaya meliputi layanan publik lewat saluran telepon, wadah perlindungan bagi perempuan dan korban kekerasan, dan jaringan perempuan untuk profesi tertentu; Keempat, melakukan aksi kampanye melalui berbagai organisasi budaya dan beragam wadah bagi organisasi perempuan beserta segala aktivitasnya meliputi komunitas penerbitan, produksi film, paguyuban seni teater, pertokoan, kafe, dan bar.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Stevi Jackson dan Jackie Jones. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2009) dalam Bagus Nur Aldiawan. *Kesetaraan Politik Untuk Perempuan Melalui Sekolah Perempuan Di Kabupaten Gresik*. Skripsi. (Surabaya: FISIP Universitas Airlangga, 2020), hlm, 24-26.

## 1.8 Kerangka Berpikir



**Gambar 1.1** *Kerangka Berpikir*

*(Sumber: diolah oleh peneliti)*

Pilkada Gresik tahun 2020 diikuti oleh dua kandidat paslon bupati dan wakil bupati. Paslon nomor urut satu adalah Pak Qosim-Dokter Alif menyandang status petahana, sedangkan paslon nomor urut dua yakni Gus Yani-Bu Min berstatus sebagai penantang. Berstatus sebagai petahana, Pak Qosim-Dokter Alif sejak awal mengantongi elektabilitas lebih tinggi dibandingkan Gus Yani-Bu Min. Tingginya elektabilitas tersebut tidak terlepas dari statusnya sebagai petahana yang juga didukung oleh organisasi perempuan NU yaitu Muslimat dan Fatayat. Dukungan dari kalangan perempuan adalah modal politik yang sangat berharga karena jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih laki-laki pada Pilkada Gresik tahun 2020.

Melihat realitas politik tersebut, Gus Yani lantas merekrut Bu Min untuk menjadi Cawabupnya. Perekrutan Bu Min sebagai Cawabup diproyeksikan untuk menggaet

dukungan pemilih perempuan. Selain itu, Bu Min yang notabene juga seorang nyai pesantren dari Ponpes Qomaruddin diharapkan mampu mengunci dukungan kalangan santri yang menjadi basis kekuatan politik terbesar di setiap gelaran Pilkada Gresik. Hasil paling cepat yang muncul tatkala Gus Yani menggandeng Bu Min adalah tren peningkatan elektabilitas sehingga menyebabkan paslon Pak Qosim-Dokter Alif mengalami stagnansi bahkan penurunan elektabilitas.

Dalam proses kampanye pemenangan paslon Gus Yani-Bu Min, status sosial sebagai nyai pesantren yang disandang oleh Bu Min dikapitalisasi untuk pemenangan. Bu Min dengan segenap modal sosial, kultural, dan politiknya menerapkan relasi patron-klien. Bu Min sebagai nyai pesantren berposisi sebagai patron bagi kliennya yakni santri dan alumni. Relasi patron-klien antara nyai pesantren dengan santri dan alumni santri bersifat kulturalis. Tawaran program kerja unggulan yang berpihak kepada santri dan perempuan merupakan instrumen patronase yang didistribusikan oleh Gus Yani-Bu Min untuk mengunci dukungan pemilih santri dan perempuan. Alhasil, nyaris seluruh ponpes beserta santri dan jejaring alumni santri, pemilih perempuan yang berasal dari berbagai organisasi, profesi dan ditataran akar rumput solid mendukung paslon Gus Yani-Bu Min sehingga mengantarkan Gus Yani-Bu Min sebagai bupati dan wakil bupati Gresik periode 2020-2024.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Fokus Penelitian**

Penelitian “Nyai Pesantren dan Pengaruh Politiknya di Pilkada: Studi Kasus Kemenangan Pasangan Cabup Fandi Akhmad Yani dan Cawabup Aminatun Habibah

Pada Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2020” berfokus pada dua hal: Pertama, alasan dipilihnya nyai pesantren yakni Bu Min sebagai Cawabup pada Pilkada Gresik tahun 2020. Kedua, bagaimana pengaruh politik nyai pesantren yakni Bu Min dalam kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gus Yani-Bu Min pada Pilkada Gresik tahun 2020.

### **1.9.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode kualitatif akan menghasilkan penelitian deskriptif dalam rupa narasi sehingga bisa dilihat lebih dalam mengenai subjek penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*), serta penelusuran data di berbagai situs penyedia data yang mendukung analisis penelitian sebagai teknik pengumpulan data.

### **1.9.3 Fenomena Penelitian**

Fenomena dalam penelitian ini antara lain menganalisis pengaruh politik nyai pesantren yakni Bu Min dalam kontestelasi pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gresik sebagai Calon Wakil Bupati Gresik bergandengan dengan Gus Yani sebagai Calon Bupati. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat fenomena di lapangan, penentuan Bu Min sebagai Cawabup didahului dengan rencana penunjukannya sebagai ketua tim kampanye perempuan. Dukungan perempuan terhadap pasangan Gus Yani-Bu Min diperoleh dari hasil kerja-kerja lobi politik dengan sejumlah struktur sayap organisasi perempuan NU di level kecamatan yakni PAC Muslimat dan PAC Fatayat. Dukungan terhadap Gus Yani-Bu Min mayoritas berasal dari kelompok taktis perempuan yang

dibentuk dalam rangka mendukung pencalonan sekaligus kemenangan Gus Yani-Bu Min.

#### **1.9.4 Subjek Penelitian**

Peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan siapapun yang memiliki peran dan memberikan pengaruh politik dalam kemenangan Gus Yani-Bu Min pada Pilkada Kabupaten Gresik 2020. Peneliti akan menemui informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan relevan bagi penulisan penelitian ini. Subjek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti antara lain: Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik dan status sosialnya sebagai nyai pesantren yang memiliki pengaruh penting dalam kemenangan paslon Gus Yani-Bu Min; Fandi Akhmad Yani, Bupati Gresik dan statusnya sebagai elit politik terpilih yang memiliki peran krusial dalam menentukan Cawabup berstatus nyai pesantren sekaligus merepresentasikan wakil perempuan; Pimpinan Ponpes Qomaruddin Gresik sebagai institusi pendidikan Islam yang mempunyai keterkaitan erat dengan Bu Min yang notabene merupakan seorang nyai di pondok pesantren tersebut. Tim sukses dan relawan sebagai mesin politik yang membantu dalam proses kemenangan paslon Gus Yani-Bu Min serta masyarakat pemilih paslon tersebut dalam kontestasi Pilkada Gresik tahun 2020.

Tabbel 1.1 *Kategori Subjek Penelitian*

| <b>No</b> | <b>Informan</b>                     | <b>Identitas Informan</b>           |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.        | Fandi Akhmad Yani, SE               | Bupati Gresik                       |
| 2.        | Nyai Hj. Aminatun Habibah           | Wakil Bupati Gresik                 |
| 3.        | Masyarakat Pemilih GusYani – Bu Min | Masyarakat Pemilih GusYani – Bu Min |

|     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
| 4.  | Khoirul Huda, S.Pd. | Ketua Tim Pemenangan Kampanye Gus Yani – Bu Min       |
| 5.  | Mujid Riduan        | Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik                       |
| 6.  | Luluk               | Aktivis Muslimat NU Kecamatan Bungah                  |
| 7.  | Sofi                | Ketua Tim Pemenangan Perempuan Paslon Gus Yani-Bu Min |
| 8.  | Azizah              | Timses Perempuan Paslon Gus Yani-Bu Min               |
| 9.  | Zainuddin           | Timses Bravo Paslon Gus Yani-Bu Min                   |
| 10. | Icha                | Elit Ponpes Al. Muniroh Ujung Pangkah                 |
| 11. | Cici                | Dispendik Kabupaten Gresik                            |
| 12. | Nur Laila           | Aktivis Muslimat NU Bungah                            |
| 13. | Harum               | Masyarakat Pemilih Paslon Gus Yani-Bu Min             |
| 14. | Ismail              | Masyarakat Pemilih Paslon Gus Yani-Bu Min             |

**Sumber:** Diolah dari berbagai sumber.

### **1.9.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat ukur peneliti dalam melakukan penelitian fenomena sosial. Instrumen penelitian difungsikan untuk memudahkan peneliti dalam mengolah informasi dan data yang telah diperoleh. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk keperluan menggali informasi bersama informan yang terdiri dari, paslon pemenang Pilkada Kabupaten Gresik 2022

Fandi Gus Yani dan Bu Min, Relawan/Ketua Tim Pemenangan Paslon Gus Yani-Bu Min, Pengasuh Pondok Pesantren Qomarudin, dan masyarakat pemilih paslon Gus Yani-Bu Min.

#### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dalam proses pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam, peneliti melakukan komunikasi secara tatap muka dengan para informan yang telah ditentukan. Dalam proses wawancara mendalam tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan terstruktur sekaligus tidak terstruktur guna memperoleh informasi akurat dari informan yang relevan untuk keperluan menjawab rumusan masalah penelitian. Selama proses wawancara mendalam, agar informasi dapat terdokumentasikan dengan baik, peneliti menggunakan alat perekam.

#### **1.9.7 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dalam konteks penelitian ini, secara teknis melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang telah ditentukan. Kedua, reduksi data adalah proses penyederhanaan, pengkategorisasian, dan pengklasifikasian informasi untuk memperoleh data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Ketiga, penyajian data adalah proses menarasikan data-data yang relevan dengan penelitian secara deskriptif dan sistematis sehingga memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan

penelitian. Keempat, kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan terakhir dari teknik analisis data yang bertujuan untuk menemukan dan menyajikan makna data yang telah dikumpulkan dengan mencari relasi, kesamaan atau perbedaan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang berbasiskan data akurat atau valid. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian tentang relevansi data dengan konsep dasar analisis menjadi lebih objektif.